

Diplomasi Ekonomi dan Pengaruh Indonesia Secara Global

Arianto Christian Hartono¹

¹ Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Korespondensi: * hartono.arianto@yahoo.com

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i1.393> | halaman: 1 - 22

Dikirim: 17-03-2025 | Diterima: 29-03-2025 | Dipublikasikan: 30-03-2025

Abstrak

Indonesia, sebagai negara yang besar secara ekonomi dan sosial-politik, belum mampu memaksimalkan kebijakan diplomasi ekonominya untuk meningkatkan pengaruhnya secara global. Negara-negara maju banyak menjadikan diplomasi ekonomi sebagai salah satu *tools* geopolitik. Untuk itu, Indonesia perlu menata ulang strategi dan kebijakan koordinasi diplomasi ekonominya dan meningkatkan peranan diplomasi ekonomi sebagai salah satu perangkat kebijakan luar negeri Indonesia. Namun demikian saat ini belum terdapat aktor yang dapat dan mampu untuk berperan sebagai koordinator diplomasi ekonomi Indonesia. Hal tersebut diperparah dengan masih adanya konflik dan tarik-menarik kewenangan antar sektor dan belum adanya koordinasi yang bersifat inklusif aktor yang dapat secara inklusif dan absolut mengkoordinasikan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia. Menggunakan perbandingan praktik koordinasi pelaksanaan diplomasi ekonomi di Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok sebagai alternatif kebijakan, tulisan ini melakukan analisis kebijakan koordinasi dalam bidang diplomasi ekonomi, guna memberikan telaah terhadap usulan kebijakan terkait diplomasi ekonomi Indonesia dan peranannya terhadap posisi Indonesia secara global.

Kata kunci: diplomasi ekonomi; kebijakan; struktur kelembagaan; Amerika Serikat; Jepang; Korea Selatan; Tiongkok; Indonesia.

I. Pendahuluan

Diplomasi ekonomi merujuk pada pemanfaatan instrumen diplomatik sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan kepentingan ekonomi suatu negara. Berbeda dengan diplomasi secara politik, diplomasi ekonomi fokus kepada pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam melaksanakan kebijakan luar negeri (Berridge dan James, 2001). Instrumen tersebut adalah *economic statecraft* yang salah satunya dapat berupa sanksi ekonomi yang secara strategis dapat mendorong dan mempengaruhi negara lain (Baldwin, 1985). Berbagai alat ekonomi digunakan dalam proses ini, termasuk perjanjian perdagangan, kebijakan investasi, sanksi ekonomi, bantuan luar negeri, serta inisiatif kerja sama bilateral dan multilateral. Pada konteks global, negara-negara tidak hanya berupaya mengamankan kepentingan nasionalnya tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik berbasis kepentingan bersama. Dalam hal tersebut, diplomasi ekonomi berkaitan erat dengan kekuasaan (*power*) sebuah negara dan pengaruhnya (*influence*) dalam tatanan hubungan internasional.

Konsep kekuasaan menurut mazhab realisme didasarkan pada tiga hal penting yaitu: kepentingan suatu negara men-*drive* kekuasaan, kekuasaan yang terkait dengan sumber daya, serta *animus dominandi*—kekuasaan atas orang lain—singkatnya, *influence* (Mearsheimer, 2001; Morgenthau dan Thompson, 1993; Waltz, 1979). Robert Dahl (1957), mengeksplorasi konsep ini dengan mengusulkan gagasan tentang kekuasaan relasional; kekuasaan adalah "untuk membuat seseorang melakukan sesuatu." Sementara itu, Singer (1963) dan Keohane (1973, 2012) melihat kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Diplomasi ekonomi terkait dengan hubungan relasional yang bersifat dua arah. Mazhab realisme percaya bahwa ketergantungan relatif (*relative dependence*) dan kemandirian relatif (*relative independence*) menentukan tingkat kerentanan (*vulnerability*) suatu negara, yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain sebagai sumber kekuasaan untuk mempengaruhi negara tersebut (Mearsheimer, 2001; Morgenthau dan Thompson, 1993; Waltz, 1979). Sementara dari perspektif liberalis, ketergantungan asimetris (*asymmetric interdependence*) adalah asal mula kekuasaan suatu negara atas negara lain dalam hubungan internasional (Hirschman, 1945; Keohane dan Nye, 1973; Rosecrance dan Stein, 1973).

Terminologi "diplomasi ekonomi" mulai banyak digunakan dalam narasi kebijakan luar negeri Indonesia, terutama pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, diplomasi menekankan pada promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi. Lebih lanjut, pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri 2015-2019, Diplomasi Ekonomi merupakan pemanfaatan alat politik internasional untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi melalui berbagai kerja sama seperti pembangunan pada sektor-sektor antara lain kesehatan, pendidikan dan pertanian, energi, lingkungan hidup, keuangan, dan pangan. Namun demikian, Pemerintah Indonesia hingga saat ini cenderung mengartikan diplomasi ekonomi dalam cakupan yang sempit, yakni dengan menitikberatkan pada peran misi-misi diplomatik dalam mendukung sektor bisnis dan keuangan nasional (CSIS, 2020). Fokus utama pendekatan ini adalah mendorong keberhasilan ekonomi serta mencapai tujuan pembangunan ekonomi secara luas, namun terbatas pada aspek perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi, tanpa secara menyeluruh mempertimbangkan faktor-faktor strategis lainnya yang dapat memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi Indonesia di kancah global.

Sebagai negara yang besar, Indonesia belum mampu memaksimalkan kebijakan diplomasi ekonominya untuk meningkatkan pengaruhnya secara global. Indonesia adalah negara anggota G20 (top 20 di dunia secara GDP, dan diprediksi menjadi top 8 pada 2028 berdasarkan laporan

IMF *World Economic Outlook* 2023). Selain itu, Indonesia juga aktif dalam berbagai forum kerja sama ekonomi maupun kesepakatan kerja sama perdagangan bebas yang bersifat regional seperti *Asia Pacific Economic-Cooperation* (APEC), *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (IPEF), dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Berdasarkan hal-hal di atas, seharusnya Indonesia memiliki pengaruh diplomasi ekonomi yang kuat dalam kancah internasional. Namun demikian, diplomasi ekonomi belumlah secara optimal berperan mendukung hal tersebut. Hal itu tercermin dari performa diplomasi ekonomi Indonesia yang hanya menempati posisi ke-9 pada *Asia Power Index*¹ pada tahun 2024, di bawah negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Australia, Russia, Korea Selatan, dan Singapura. Sementara itu, berdasarkan sub-komponen *Economic Diplomacy*, Indonesia berada di posisi ke-8 dengan poin 35.8, sedikit di atas negara-negara ASEAN lain seperti Viet Nam (35.2) dan Thailand (33.8), dengan gap yang cukup jauh dengan Korea Selatan (40.5) di posisi ke-7 dan Tiongkok (93.8) di posisi puncak. Mempertimbangkan status dan skala ekonomi Indonesia sebagai negara anggota G20, seharusnya Indonesia dapat mencapai nilai yang lebih tinggi dari Malaysia (41.3) dan bahkan Singapura (57.7) pada posisi kedua.

Untuk itu, Indonesia perlu menata ulang strategi dan kebijakan koordinasi diplomasi ekonominya, guna lebih memberikan peranan dalam meningkatkan pengaruh Indonesia pada lingkup global. Selama ini, diplomasi ekonomi Indonesia berjalan melalui keterlibatan aktif pada forum-forum internasional oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, serta perwakilan resmi Indonesia di berbagai negara. Namun demikian di tengah ketidakpastian kebijakan karena kebijakan ultranasionalis Amerika Serikat, melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dan fenomena *friend sharing-nearshoring*, Indonesia masih cenderung menjadi negara yang lebih *concern* akan dampaknya kepada perekonomian Indonesia, daripada sebagai negara yang dapat memainkan peran lebih kuat secara global dalam menghadapi kondisi dimaksud.

Dalam rangka menilai urgensi reformasi kebijakan diplomasi ekonomi, perlu penjabaran terkait implementasi kebijakan diplomasi ekonomi saat ini, untuk memberikan gambaran dan mengidentifikasi terkait rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan. Beberapa isu besar melingkupi praktik diplomasi Indonesia saat ini, antara lain konflik dan tarik-menarik kewenangan antar sektor yang merasa berwenang, belum adanya orkestrator yang dapat secara inklusif dan absolut mengkoordinasikan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia, dan belum adanya instansi yang secara komprehensif mampu dan *suitable* untuk berperan sebagai ujung tombak diplomasi ekonomi Indonesia. Penulisan analisis ini dilakukan sebagai proses analisa kebijakan dalam bidang hubungan luar negeri dan diplomasi ekonomi, guna menanggapi fenomena pada kinerja diplomasi ekonomi Indonesia dimaksud. Lebih lanjut, tulisan ini diarahkan untuk memberikan telaah terhadap rekomendasi kebijakan terkait struktur kelembagaan diplomasi ekonomi Indonesia dalam rangka peningkatan pengaruh Indonesia pada lingkup global.

II. Metode

Creswell dan Creswell (2018) mengidentifikasi lima pendekatan yang berbeda: penelitian naratif, fenomenologi, teori dasar, etnografi, dan studi kasus. Tulisan ini adalah sebuah *desk study* dan tinjauan literatur yang menggabungkan telaah terhadap fenomenologi dan studi kasus

¹ The Asia Power Index, launched by the Lowy Institute in 2018, annually measures resources and influence to rank the relative power of states in Asia.

sebagai dasar untuk perumusan strategi dan pendekatan yang diusulkan. Analisis dengan metode campuran dianggap lebih cocok untuk penulisan ini, dengan analisis kualitatif mengkaji dan membandingkan fenomenologi dari kebijakan terkait struktur kelembagaan diplomasi ekonomi berbagai negara-negara yang menjadi subjek pengamatan dan analisis kuantitatif dilakukan terhadap perubahan struktur ekonomi negara-negara dimaksud sebagai dampak dari penerapan kebijakan terkait struktur kelembagaan di atas. Sementara itu, untuk memilih alternatif dari strategi dan kebijakan yang ditawarkan oleh masing-masing studi kasus, tulisan ini menggunakan *Bardach Eightfold Path (Practical Approach)*² dalam mengelaborasi berbagai opsi yang berbeda dalam cakupan, strategi implementasi, atau sasaran penerima manfaat, berdasarkan perbandingan yang menilai karakteristik dari setiap alternatif: *technical feasibility, economic and financial possibility, political viability*, dan *administrative operability*. Lingkup penelitian ini mencakup persandingan terhadap praktik kebijakan dan struktur kelembagaan diplomasi ekonomi Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Masing-masing dari negara tersebut menawarkan pengalaman, kebijakan, dan strategi yang berbeda bagi Indonesia -sebagai negara berkembang- untuk dapat mengadopsi kebijakan terkait struktur kelembagaan yang sesuai bagi diplomasi ekonomi Indonesia.

III. Analisis dan Pembahasan

3.1. Sejarah Diplomasi Ekonomi di Indonesia

Istilah diplomasi ekonomi pertama kali muncul dalam RPJMN 2015-2019 (dan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019) dalam lingkup yang relatif sempit, dengan fokus utama pada promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi. Sementara itu RPJMN 2020-2024 menjelaskan tiga elemen utama dalam diplomasi ekonomi, yaitu investasi, ekspor, dan pariwisata, serta menambahkan aspek kerja sama pembangunan internasional. Dalam RPJMN 2025-2029, diplomasi ekonomi menjadi landasan dalam pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif dan penjagaan kepentingan nasional yang diwujudkan melalui serangkaian intervensi kebijakan pada sektor pertahanan-keamanan, politik luar negeri, kerja sama pembangunan internasional, ekonomi, serta ketenagakerjaan. Lebih dalam, pada RPJPN 2025-2045, diplomasi tangguh merupakan kaidah utama dalam memperkuat peran di kancah internasional dalam rangka mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Diplomasi tangguh merupakan diplomasi total yang sinergis meliputi diplomasi ekonomi, kedaulatan, kepemimpinan, perlindungan, dan publik.

Namun demikian, secara terminologi, diplomasi ekonomi Indonesia sebetulnya telah berjalan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan kajian Kementerian Luar Negeri (2015)³, pada masa awal kemerdekaan hingga pemerintahan Orde Lama, diplomasi ekonomi Indonesia didominasi kepentingan politik non-blok selama perang dingin dan tidak menjadi isu utama dalam politik luar negeri yang bebas aktif (lihat Tabel 1 di bawah). Namun demikian di sisi lain pada saat itu juga terjadi radikalisme politik luar negeri, di mana diplomasi ekonomi tidak tertata dengan baik karena berada di bawah kepentingan politik, yang belum cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada masa itu.

² Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving (6th ed.). CQ Press.

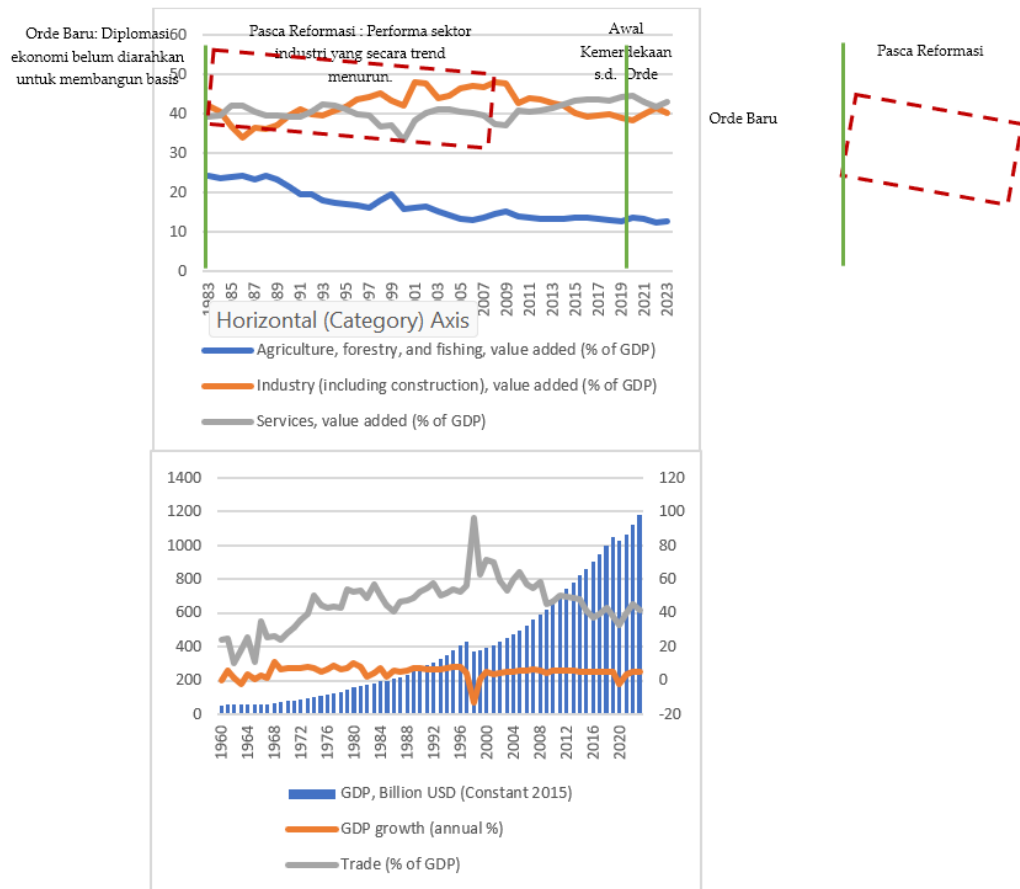
³ Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi atas Perjanjian Perdagangan dan Investasi, Pusat P2K-OI BPPK - Kementerian Luar Negeri RI

Tabel 1. Sejarah Diplomasi Ekonomi Indonesia 1949-2024

Awal Kemerdekaan - Orde Lama	Masa Orde Baru	Pasca Reformasi hingga Saat Ini
● Konsepsi awal diplomasi ekonomi Indonesia: ○ didominasi kepentingan politik non-blok selama perang dingin ○ tidak menjadi isu utama dalam politik luar negeri bebas aktif ● Era radikalisme politik luar negeri: ○ Diplomasi ekonomi tidak tertata baik karena berada di bawah kepentingan politik. ○ Diplomasi ekonomi ke Blok Timur untuk mendapatkan bantuan ekonomi tetapi tidak cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan.	● Diplomasi ekonomi difokuskan pada pencarian utang luar negeri dalam rangka pembangunan ekonomi. ● Diplomasi ekonomi tidak diarahkan untuk membangun basis industri manufaktur yang kuat. ○ kalah bersaing dengan negara-negara tetangga di ASEAN. ● Diplomasi ekonomi masih didominasi paradigma politik, tidak <i>by design</i> untuk kemajuan diplomasi ekonomi.	● Keikutsertaan dalam ASEAN+1 lebih merupakan konsekuensi logis dari sentralitas ASEAN dalam kebijakan luar negeri Indonesia daripada perhitungan ekonomi. ○ munculnya kekhawatiran pasar Indonesia akan dibanjiri produk-produk dari Tiongkok ○ pesimisme bahwa Indonesia hanya menjadi pasar bagi negara-negara ASEAN ● Beralih dari politik luar negeri menuju ke tata kelola hubungan luar negeri (yang mencakup isu diplomasi ekonomi) ○ <i>Policy alignment</i> antara Kementerian Luar Negeri dengan instansi pemerintah lainnya

Sumber: Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi atas Perjanjian Perdagangan dan Investasi, Pusat P2K-OI BPPK - Kementerian Luar Negeri RI (2015)

Memasuki masa pemerintahan Orde Baru, diplomasi ekonomi difokuskan pada pencarian utang luar negeri dalam rangka pembangunan ekonomi, walaupun masih didominasi oleh paradigma politik, sehingga tidak *by design* untuk mendukung kemajuan ekonomi sebagai tujuan utamanya. Diplomasi ekonomi belum diarahkan untuk membangun basis industri manufaktur yang kuat, sementara pada masa ini, Indonesia sudah harus bersaing dengan negara-negara tetangga di ASEAN, dalam hal perdagangan internasional. Hal tersebut tercermin pada ilustrasi Struktur Ekonomi Indonesia 1983-2023 (Gambar 1 di bawah), di mana selama pemerintahan Orde Baru, sektor Industri belum secara stabil menjadi sektor yang dominan dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut berdampak pada periode selanjutnya, di mana sektor Industri cenderung mengalami trend yang negatif, yang menunjukkan tanda-tanda awal terjadinya deindustrialisasi.



Gambar 1. Struktur Ekonomi Indonesia, 1983-2023 dan Performa Ekonomi serta Perdagangan Indonesia, 1960-2024

Sumber: *World Development Indicators* (World Bank, diolah oleh Penulis)

Pasca reformasi, Pemerintah mulai beralih dari politik luar negeri menuju ke tata kelola hubungan luar negeri (yang mencakup isu diplomasi ekonomi), di mana mulai adanya *policy alignment* antara Kementerian Luar Negeri dengan instansi pemerintah terkait lainnya. Indonesia banyak terlibat dalam kesepakatan-kesepakatan kerjasama perdagangan pada level bilateral (FTA/CEPA) dan regional (ASEAN+1s dan RCEP). Selain itu, Indonesia juga aktif untuk dapat masuk menjadi anggota dari organisasi-organisasi ekonomi yang bersifat multilateral seperti *the Organisation for Economic Co-operation and Development* (OCED) dan BRICS. Namun demikian, namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa Indonesia hanya menjadi pasar bagi negara-negara lainnya. Hal tersebut didasarkan oleh sentimen bahwa keikutsertaan Indonesia dalam FTA/CEPA lebih merupakan konsekuensi logis dari kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia daripada perhitungan ekonomi.

3.2. Pembagian Kewenangan antar Aktor Diplomasi Ekonomi Indonesia

Secara teknis, Indonesia telah menjalankan berbagai inisiatif sebagai bagian dari diplomasi ekonominya, yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Namun demikian, beberapa tugas dan fungsi dijalankan secara spesifik oleh instansi tertentu, sementara yang lain saling tumpang tindih. Kajian yang dilakukan oleh CSIS dan Kementerian PPN/Bappenas (2020)

melakukan pemetaan peranan para pemangku kepentingan dari sektor Pemerintahan pada Diplomasi Ekonomi Indonesia ke dalam tiga kategori, yaitu pelaksana diplomasi ekonomi, perencana diplomasi ekonomi, dan pendukung diplomasi ekonomi (Tabel 2 di bawah).

Tabel 2. Pemetaan Peran dan Fungsi K/L Pemangku Kepentingan Diplomasi Ekonomi Indonesia

Pelaksana Teknis	Perumus Kebijakan	Pendukung
• Kementerian Luar Negeri • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • K/L Sektor Terkait	Arah Kebijakan • K/L Pelaksana Teknis • Kementerian PPN/Bappenas Regulasi • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) • Kementerian Hukum dan HAM	• Kementerian Keuangan • Bank Indonesia • Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) • Bank Komersial • K/L Sektor Terkait

Sumber: Kajian Definisi dan Pemetaan Diplomasi Ekonomi Indonesia (CSIS dan Kementerian PPN/Bappenas, 2020)

Pada kajian tersebut disampaikan bahwa beberapa tugas dan fungsi diplomasi ekonomi dijalankan secara khusus oleh aktor tertentu. Dalam konteks lima pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas implementasi dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi (pelaksana teknis dan perumus kebijakan), pembagian tugas dan fungsi telah ditetapkan dengan cukup jelas untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Kementerian Luar Negeri, misalnya, memainkan peran penting dalam menjalin hubungan diplomatik yang mendukung kebijakan perdagangan dan investasi Indonesia. Kementerian Perdagangan fokus pada perundingan dan pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional guna membuka akses pasar bagi produk dan jasa nasional. BKPM berperan dalam menarik investasi asing langsung (FDI) serta mengkoordinasikan kebijakan investasi untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Kadin berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan sektor swasta, memastikan bahwa regulasi yang diterapkan selaras dengan kebutuhan dunia usaha. Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) berperan dalam dua fungsi utama, yaitu sebagai perumus kebijakan dan pendukung.

Namun, dalam konteks pemangku kepentingan yang mendukung implementasi diplomasi ekonomi Indonesia (pemangku kepentingan pendukung), kajian tersebut berpendapat masih terdapat tumpang tindih dalam tugas dan fungsi di antara Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini mencerminkan tantangan yang masih dihadapi dalam diplomasi ekonomi, khususnya terkait kurangnya integrasi dan koordinasi kebijakan, belum adanya mekanisme yang terstruktur dalam penyelenggaraan investasi ke luar negeri, serta belum jelasnya definisi tugas pokok dan alur koordinasi di antara pemangku kepentingan utama, sebagaimana diidentifikasi dalam kajian ini. Berdasarkan kajian tersebut, terdapat 12 (dua belas) pemangku kepentingan yang berperan sebagai pendukung dalam diplomasi ekonomi Indonesia, yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/*Indonesia Eximbank*); Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN); Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, termasuk *Visit*

Indonesia Tourism Office; Bank Indonesia; Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Pertanian; dan Kementerian Keuangan.

Kurangnya mekanisme koordinasi yang jelas dan tumpang tindihnya peran di antara pemangku kepentingan ini menunjukkan perlunya peningkatan integrasi kebijakan dan kerja sama lintas lembaga. Upaya yang lebih sistematis dalam menyelaraskan peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar diplomasi ekonomi Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang optimal bagi perekonomian nasional. Dengan pembagian tugas yang jelas dan peran yang saling melengkapi, koordinasi antara pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan diplomasi ekonomi. Sinergi yang kuat antar lembaga diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan daya saing nasional, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, diplomasi ekonomi Indonesia saat ini masih dilaksanakan oleh berbagai kementerian, masing-masing bertanggung jawab atas aspek berbeda dalam keterlibatan internasional.

3.3. Proses Koordinasi Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Peranan Masing-masing Aktor

Pada bagian sebelumnya telah dibahas bagaimana diplomasi ekonomi di Indonesia telah melibatkan instansi-instansi pada sektor terkait. Namun demikian, proses koordinasi dan interaksi antar pihak masih bersifat *ad hoc*, belum ada pemetaan dan pembagian tugas yang jelas mengenai hal tersebut, yang menyebabkan tarik-menarik kewenangan antar sektor, yang masing-masing merasa mengawal kepentingan Nasional Indonesia, dari kacamata sektor terkait (Sending, Puliot, and Neumann, 2011; Astuti dan Fathun, 2020). Selain itu, peranan dari masing-masing pemangku kebijakan di atas sangatlah beragam berdasarkan sektor, namun belum ada orkestrator yang dapat secara inklusif dan absolut mengkoordinasikan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia guna efektivitas partisipasi Indonesia pada forum maupun perjanjian internasional yang diikuti dan disepakati (Martauli, 2015; Priamarizki, 2024). Hal tersebut mencerminkan belum adanya instansi yang secara komprehensif mampu (capable) dan sesuai (suitable) untuk dapat berperan sebagai ujung tombak diplomasi ekonomi Indonesia (Nabs-Keller, 2013; Santoso, Dermawan, and Moenardy, 2024).

Berdasarkan pemetaan diplomasi ekonomi dengan menggunakan tools seperti *commercial diplomacy*, *trade diplomacy*, *financial diplomacy*, *inducements*, dan *sanctions* (Okano-Heijmans, 2013), kajian yang dilakukan oleh Presisi Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas (2020) memetakan koordinasi pelaksanaan diplomasi ekonomi di Indonesia (Tabel 3). Namun demikian, masih sempitnya definisi terkait diplomasi ekonomi Indonesia yang hanya berfokus pada peningkatan perdagangan, pariwisata, dan investasi, berdampak pada lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan diplomasi ekonomi di Indonesia. Meskipun berbagai aktor dalam diplomasi ekonomi Indonesia telah berupaya melakukan koordinasi, interaksi yang terjadi masih bersifat *ad hoc* dan belum didukung oleh kerangka analitis yang jelas. Tidak adanya pendekatan sistematis dalam proses koordinasi ini menyebabkan tumpang tindih peran dan kebijakan, sehingga menghambat efektivitas implementasi diplomasi ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3. Koordinasi Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi Indonesia

<i>Tools</i>	<i>Actions</i>	<i>Actors</i>
Diplomasi Komersial	Promosi dagang, promosi investasi, advokasi bisnis, promosi pariwisata	● Kementerian Perdagangan: promosi dagang, misi dagang, advokasi bisnis, termasuk market intelligence ● Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM: promosi investasi ● Kementerian Pariwisata: promosi pariwisata
Diplomasi Komersial	Negosiasi perdagangan baik bilateral, regional, dan multilateral	Kementerian Perdagangan
Diplomasi Komersial	Currency swap agreements; exchange rate policy; government bonds; freezing assets; withholding dues or payments	Bank Indonesia
Inducements	Bantuan hibah, pinjaman, bantuan kemanusiaan, pemberian akses ke teknologi, dan akses keanggotaan dalam organisasi internasional	Kementerian Luar Negeri
Pembukaan Kantor Diplomantik	KJRI dan KBRI	Kementerian Luar Negeri

Sumber: Kajian Penyusunan Rancangan Strategi Perkuatan Diplomasi Ekonomi Indonesia (Presisi Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas, 2020)

Selain itu, belum terdapat pembagian tugas yang terstruktur di antara kementerian dan lembaga terkait, yang mengakibatkan kurangnya kejelasan dalam peran serta tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Tidak adanya koordinator maupun orkestrator yang ditunjuk secara resmi juga menjadi kendala dalam menciptakan arah strategis yang terintegrasi, sehingga berbagai inisiatif dalam diplomasi ekonomi cenderung berjalan secara terpisah tanpa sinergi yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan berbasis data guna memastikan bahwa kebijakan dan program diplomasi ekonomi dapat berjalan secara efektif, selaras dengan kepentingan nasional, serta mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan dan investasi global.

Tabel 4. Peranan Aktor Diplomasi Ekonomi Indonesia

Elemen Diplomasi Ekonomi	Tipologi Diplomasi Ekonomi Indonesia	Implementasi di Indonesia
<i>External Economic Management</i>	<i>Traditional</i>	Peran yang terbatas bagi Kementerian Luar Negeri; dijalankan oleh Kementerian terkait secara independen
<i>Policy Management</i>	<i>Traditional</i>	Terbatasnya peran bagi Kementerian Luar Negeri; koordinasi dilakukan oleh 20 Kementerian terkait (minus Kementerian Luar Negeri)
<i>Role of Non-State Actors</i>	<i>Traditional</i>	Terbatasnya koordinasi antara pihak pemerintah dan swasta
<i>Economic Aid: Recipient</i>	<i>Traditional</i>	Dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas dan peran Kementerian Luar Negeri yang terbatas (Indonesia masih menerima bantuan luar negeri dalam jumlah besar)
<i>Economic Aid: Donor</i>	<i>Traditional</i>	Dikelola oleh Kementerian PPN/ dan peran Kementerian Luar Negeri yang terbatas (Indonesia hanya memberikan bantuan kecil berupa <i>humanitarian assistance</i>)
<i>Trade Promotion</i>	<i>Niche-Focused</i>	Kementerian Luar Negeri turut berperan, namun terbatas pada beberapa bidang prioritas sesuai target kerja sama ekonomi
<i>Investment Promotion</i>	<i>Niche-Focused</i>	Kementerian Luar Negeri turut berperan dengan mengaktifkan jaringan kantor-kantor perwakilan di luar negeri
<i>Regional Diplomacy Role</i>	<i>Evolving</i>	Kementerian Luar Negeri berperan secara aktif dan memiliki peran strategis diawasannya

Sumber: Paradigma dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia (Killian, 2021)

Tipologi diplomasi ekonomi untuk negara berkembang dapat dibagi menjadi 4 (empat) level, antara lain: *traditional*, *niche-focused*, *evolving*, dan *innovative* (Rana, 2007). Implementasi diplomasi ekonomi yang baik tercermin dari koordinasi yang baik antar pemangku kebijakan yang terlibat. Rana (2007) menggunakan delapan indikator untuk menilai hal tersebut, antara lain: *External Economic Management*, *Policy Management*, *Role of Non-State Actors*, *Economic Aid: Recipient*, *Economic Aid: Donor*, *Trade Promotion*, *Investment Promotion*, dan *Regional Diplomacy Role*. Menggunakan kriteria di atas, Killian (2021) menilai proses koordinasi diplomasi ekonomi di Indonesia masih belum optimal, di mana mayoritas proses diplomasi ekonomi Indonesia masih pada level *traditional* (Tabel 4 di atas). Hal tersebut berkaitan dengan, pada beberapa indikator seperti *External Economic Management*, *Policy Management*, *Economic Aid*, serta *Trade and Investment Promotion*, proses koordinasi diplomasi ekonomi dilakukan secara independen oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait, tanpa melibatkan (atau dengan minimnya kelibatan) dari Kementerian Luar Negeri. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa, Kementerian Luar Negeri yang diharapkan untuk dapat berperan sebagai

koordinator dan orkestrator bagi diplomasi ekonomi Indonesia, masih mengalami keterbatasan peranan dalam prosesnya mengawal diplomasi ekonomi Indonesia.

IV. Alternatif Pilihan Kebijakan

Telaah terhadap mazhab-mazhab ekonomi terkait, menawarkan opsi-opsi seperti *Mercantilism* (List, 1909) yang mendukung pemikiran bahwa diplomasi ekonomi harus berada di bawah kewenangan kementerian yang mengatur keuangan negara (Negara harus mengendalikan sumber daya ekonomi untuk mempertahankan kekuatan nasional dan daya saing) dan *Liberal Institutionalism* (Keohane, 1984) yang berargumen bahwa diplomasi ekonomi berada di bawah kewenangan kementerian yang melakukan negosiasi perdagangan bebas dan bermitra dengan institusi perdagangan global (diplomasi ekonomi paling efektif ketika institusi internasional yang berbasis pada aturan yang mengatur hubungan perdagangan). Sementara itu, berdasarkan telaah secara geoekonomi (Luttwak, 1990) merekomendasikan koordinasi antara sektor ekonomi dan keamanan, memastikan pendekatan yang terpadu dalam diplomasi ekonomi.

Berdasarkan telaahan penulis dari studi kasus implementasi diplomasi ekonomi pada berbagai negara, pelaksanaan diplomasi ekonomi terdiri dari beberapa praktik berbeda. Praktik pertama, urusan keuangan, perdagangan, dan luar negeri dikelola oleh satu lembaga. Praktik kedua, urusan keuangan, perdagangan, dan luar negeri dikelola oleh lembaga yang terpisah. Praktik ketiga, diplomasi ekonomi dapat dilakukan dengan berdasarkan kepada Undang-Undang terkait diplomasi (*Diplomacy Act*) yang diterjemahkan lebih lanjut ke dalam dokumen lainnya sebagai acuan pelaksanaan diplomasi ekonomi. Serta, praktik keempat, diplomasi ekonomi dilaksanakan melalui penerjemahan visi terkait diplomasi ekonomi yang disampaikan dalam *speeches* ataupun pemikiran-pemikiran dari Pemimpin negara ke dalam kebijakan-kebijakan diplomasi ekonomi terkait.

4.1. Koordinasi Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi pada Satu Lembaga

Untuk praktik pertama, di mana pada proses diplomasi ekonomi, urusan keuangan, perdagangan, dan luar negeri dikelola oleh satu lembaga, Amerika Serikat merupakan contoh di mana Kementerian Luar Negeri (*Department of State/DOS*) yang memiliki kewenangan dari sisi politik luar negeri, menjadi pemimpin untuk diplomasi ekonomi AS, dengan dukungan dari Kementerian Perdagangan, yang berwenang dalam hal kebijakan perdagangan Amerika Serikat. AS memiliki *Economic Diplomacy Action Group* (EDAG), diketuai oleh *Secretary of State* (Menteri Luar Negeri) yang melakukan konsultasi erat dengan *Secretary of Commerce* (Menteri Perdagangan) dan USTR (ekuivalen dengan Menteri Perdagangan dengan fungsi tambahan terkait bidang ekonomi dan perdagangan luar negeri). DOS bertugas untuk menyeimbangkan kepentingan politik luar negeri dan ekonomi, dengan fokus pada upaya promosi pasar terbuka, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan keamanan ekonomi.

Amerika Serikat (AS) memiliki sejarah diplomasi ekonomi yang panjang, di mana tulisan ini akan mencakup periode selama 1900 hingga sekarang. *United States Department of Commerce* (USDOC) didirikan pada 1903, diikuti dengan pembentukan United States Chamber of Commerce pada tahun 1913. *US Chamber of Commerce* bekerja sama dengan *US Embassy* untuk menjadi penghubung bagi kepentingan publik dan swasta. Pada tahun 1916, *US International Trade Commission* dibentuk, diikuti oleh pembentukan *US Commercial Service* pada tahun 1927. Lebih lanjut, AS merupakan promotor pembentukan *World Bank* dan IMF (melalui Bretton Woods System), serta pendirian GATT pada tahun 1947 (yang kemudian berubah menjadi WTO pada tahun 1995). Penerapan *Bretton Woods System* sejak medio 1940

an hingga berakhirnya pada tahun 1971, merupakan legitimasi dari diplomasi ekonomi AS. Guna mendukung legitimasi dimaksud, selama kurun waktu tersebut, AS mendirikan *the United States Agency for International Development* (USAID) pada tahun 1961 dan *the United States Trade Representative* (USTR) pada tahun 1963.



Gambar 2. Diplomasi Ekonomi Amerika Serikat, 1900–2024

Sumber: Penulis (diolah dari berbagai sumber)*

Amerika Serikat memulai periode keterlibatan dalam FTA/CEPA lebih awal dari negara lainnya, sejak periode 1980 an. Dimulai dari pembentukan *Foreign Commercial Services of USDOIC* dan *the International Trade Administration of USDOIC* pada tahun 1980, AS berhasil menyepakati US-Israel FTA pada tahun 1985, US-Canada FTA (CUFSTA) pada tahun 1988, *Transatlantic Declaration on EC-US Relations* (1990), hingga penandatanganan *North-America Free Trade Agreement* (NAFTA) pada tahun 1992. Pembentukan instansi-instansi pendukung diplomasi ekonomi seperti USTR, *Foreign Commercial Services*, *International Trade Administration*, dan *Bureau of Industry and Security* berpengaruh positif terhadap performa diplomasi ekonomi AS, terutama dari kacamata komersial dan perdagangan. Amerika Serikat merupakan contoh di mana Kementerian Kementerian Luar Negeri yang memiliki kewenangan dari sisi politik luar negeri, menjadi pemimpin untuk diplomasi ekonomi AS, dengan dukungan dari Kementerian Perdagangan, yang berwenang dalam hal kebijakan perdagangan Amerika Serikat.

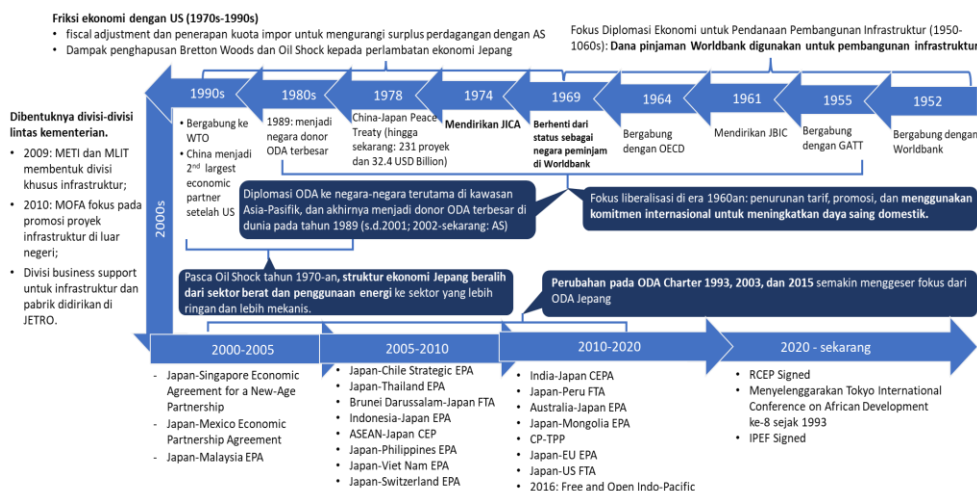
4.2. Koordinasi Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi pada Lembaga Terpisah

Pada praktik kedua, di mana pada proses diplomasi, urusan keuangan, perdagangan, dan luar negeri dikelola oleh lembaga yang terpisah, Jepang merupakan contoh di mana kementerian yang menangani urusan luar negeri (*Ministry of Foreign Affairs*) yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan luar negeri (dengan implementasi terkait kerja sama pembangunan dilaksanakan oleh *Japan International Cooperation Agency/JICA*) dan kementerian yang menangani urusan perdagangan (*Ministry of Economic, Trade, and Investment*) yang bertugas

* Solti, A. (2024). The Bretton Woods System as the Cornerstone of the United States' Hegemony. *Financial and Economic Review*, 23(2), 186–204.; Sharov, O. (2018). Economic Diplomacy as a Symbiosis of Science and Politics. *International Economic Policy*, (28), 64–87.; Jaffer, N. (2024). Chinese Soft Power and American Exceptionalism: A Comparative Analysis in the Global Context. *Pakistan Journal of American Studies*, 42(1), 53–82.; <https://history.state.gov/milestones>;

untuk merumuskan kebijakan perdagangan (dengan implementasi dari kerja sama ekonomi dilaksanakan oleh *Japan External Trade Organization/JETRO*). Berdasarkan informasi resmi dari *Ministry of Foreign Affairs Jepang*⁵, terdapat tiga aspek yang menjadi fokus Jepang dalam mempromosikan diplomasi ekonominya, sebagai berikut: (1) pembuatan aturan untuk memperkuat sistem ekonomi global yang bebas dan terbuka dengan mempromosikan berbagai perjanjian ekonomi; (2) mendukung ekspansi bisnis luar negeri perusahaan-perusahaan Jepang melalui promosi kemitraan publik-swasta; dan (3) mempromosikan diplomasi sumber daya bersama dengan pariwisata masuk ke Jepang.

Secara historis, selama periode 1950-1960 fokus diplomasi ekonomi Jepang adalah untuk pendanaan pembangunan infrastruktur, di mana dana pinjaman *World Bank* digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik, jalan tol, dan kereta cepat; bukan untuk pembangunan sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan *rural-development*. Selama periode selanjutnya di 1960-1970, Jepang mulai meningkatkan kemandiriannya dengan mendirikan *Japan Bank for International Cooperation* (1961), bergabung dengan *Organization for Economic Cooperation and Development/OECD* (1964), dan keluar dari status negara peminjam di *World Bank* pada 1969. Tumbuhnya perekonomian Jepang selama periode 1970-1990 tidak terlepas dari dampak negatif penghapusan sistem *Bretton Woods* dan krisis minyak (*oil shock*), yang membuat struktur ekonomi Jepang beralih dari sektor berat dan penggunaan energi (i.e. baja dan petrokimia) ke sektor yang lebih ringan dan lebih mekanis (*high-tech products*).



Gambar 3. Diplomasi Ekonomi Amerika Serikat, 1900-2024

Sumber: Penulis (diolah dari berbagai sumber)⁶

Era 2000-2020 merupakan era globalisasi di mana banyak kesepakatan kerja sama perdagangan bebas disepakati, baik secara bilateral maupun regional. Tentunya, untuk

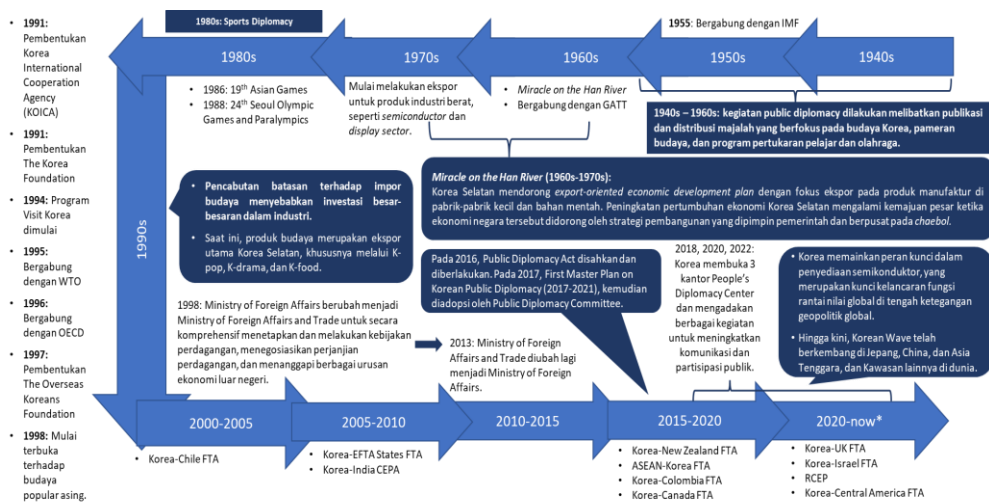
⁵ <https://www.mofa.go.jp/policy/economy/index.html>

⁶ Okano-Heijmans, M. (2012). Japan's New Economic Diplomacy: Changing Tactics or Strategy? *Asia-Pacific Review*, 19(1), 62–87. <https://doi.org/10.1080/13439006.2012.678628>; Armstrong, S. (2021). Economic Diplomacy and Economic Security under Abe. *Asian Economic Policy Review*, 16(2), 283–299. <https://doi.org/10.1111/aep.12335>; Qin, Q. (2024). Iokibe, M., & Robert D. Eldridge, T. a. A. b. (2013). *The Diplomatic History of Postwar Japan*. Taylor and Francis. http://www.123library.org/book_details/?id=113571

mendukung implementasi dan pemanfaatan dari FTA/CEPA tersebut, diperlukan kontribusi dari pemberian bantuan *terkait technical assistance and capacity building* (TACB) maupun *economic and technical cooperation* (ECOTECH) yang diberikan Jepang ke negara-negara mitra kerjasamanya. Pendirian lembaga-lembaga seperti JBIC, JICA, dan JETRO sangat berperan dalam mendukung proses tersebut. Selain itu, selama periode dimaksud juga banyak dibentuk divisi-divisi lintas Kementerian untuk mendukung sinkronisasi antara pemberian bantuan ODA Jepang dan implementasi kesepakatan kerja sama perdagangan bebas dengan negara-negara lain. Pada tahun 2009, *Ministry of Economy, Trade and Industry* (METI) dan *Ministry of Land, Infrastructure, and Transport* (MLIT) membentuk divisi khusus untuk membantu pembangunan industri kereta api cepat, pengadaan air, dan tenaga nuklir. Sementara itu pada 2010, MoFA fokus pada promosi proyek infrastruktur di luar negeri dengan dibentuknya unit khusus sektor tersebut pada kantor kabinet, serta pendirian divisi *business support* untuk infrastruktur dan pabrik di *Japan External Trade Organization* (JETRO) untuk bekerja sama dengan kantor promosi dan strategi METI. Jepang –dengan kolaborasi antara MoFA dan METI, telah menunjukkan betapa koordinasi antar pihak yang berwenang adalah sangat penting. Selain itu, pendirian JBIC, JICA, dan JETRO- menunjukkan bahwa diperlukan juga dukungan dari dan kolaborasi dengan pihak di luar Pemerintah untuk eksekusi men-*deliver* kebijakan-kebijakan diplomasi ekonomi.

4.3. Koordinasi Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi berdasarkan Undang-Undang terkait Diplomasi

Lebih lanjut, pada praktik ketiga, di mana implementasi dari diplomasi ekonomi dilakukan berdasarkan *Diplomacy Act* dan dokumen turunannya sebagai acuan pelaksanaan diplomasi ekonomi, Korea Selatan berfokus pada *public diplomacy* yang bertujuan untuk memenuhi dan mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap demokratisasi diplomasi, serta memfasilitasi peningkatan keterlibatan dalam perumusan kebijakan luar negeri Korea Selatan yang baru. Secara historis, selama periode 1940–1960, *public diplomacy* di Korea Selatan dilakukan dengan melibatkan publikasi dan distribusi majalah yang berfokus pada budaya Korea, pameran budaya, dan program pertukaran pelajar dan olahraga. Setelah bergabung ke *International Monetary Fund* (IMF) pada 1955 dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada 1967, Korea Selatan menikmati periode *the Miracle of the Han River* selama 1960–1970 an. Sementara periode 1980 an Korea Selatan fokus kepada memasarkan budayanya melalui *sports diplomacy* (dengan menjadi tuan rumah dari *the 19th Asian Games* pada 1986 dan *the 24th Seoul Olympic and Paralympic Games* pada 1988), periode 1990 an merupakan periode di mana Korea Selatan benar-benar fokus dalam diplomasi ekonominya. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya *Korea International Cooperation Agency* (KOICA) dan *The Korea Foundation* pada tahun 1991, bergabung ke WTO dan OECD pada 1995 dan 1996, dan pembentukan *The Overseas Koreans Foundation* pada tahun 1997.



Gambar 4. Diplomasi Ekonomi Amerika Serikat, 1900–2024

Sumber: Penulis (diolah dari berbagai sumber)⁷

Korea Selatan melakukan investasi besar-besaran dalam industri budaya yang pada akhirnya memunculkan produk budaya berupa gelombang *Hallyu* (*Korean Wave*), yang mulai muncul sejak akhir periode 1990 dan awal periode 2000. Saat ini, produk budaya merupakan ekspor utama Korea Selatan, khususnya melalui *K-pop*, *K-drama*, dan *K-food*. Korea Selatan, yang berfokus pada People's Diplomacy, salah satunya melalui ekspor memfokuskan dukungan dari pemerintah melalui pendirian KOICA, penyusunan *Public Diplomacy Act* serta *Master Plan on Korean Public Diplomacy*, dan pembukaan *People's Diplomacy Center* selama kurun waktu 1990–2020, yang berkontribusi terhadap meningkatnya performa ekonomi Korea Selatan selama periode tersebut. Korea Selatan merupakan contoh koordinasi pelaksanaan diplomasi ekonomi dilakukan dengan mengutamakan praktik dari Undang-Undang terkait Diplomasi. Pada 2016, *Public Diplomacy Act* disahkan dan diberlakukan dan dokumen turunannya, *the First Master Plan on Korean Public Diplomacy* (2017–2021) diadopsi oleh *Public Diplomacy Committee* pada tahun 2017. Sebagai salah satu implementasinya, sejak tahun 2018 Korea Selatan telah membuka 3 kantor *People's Diplomacy Center* dan mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan komunikasi dan partisipasi publik.

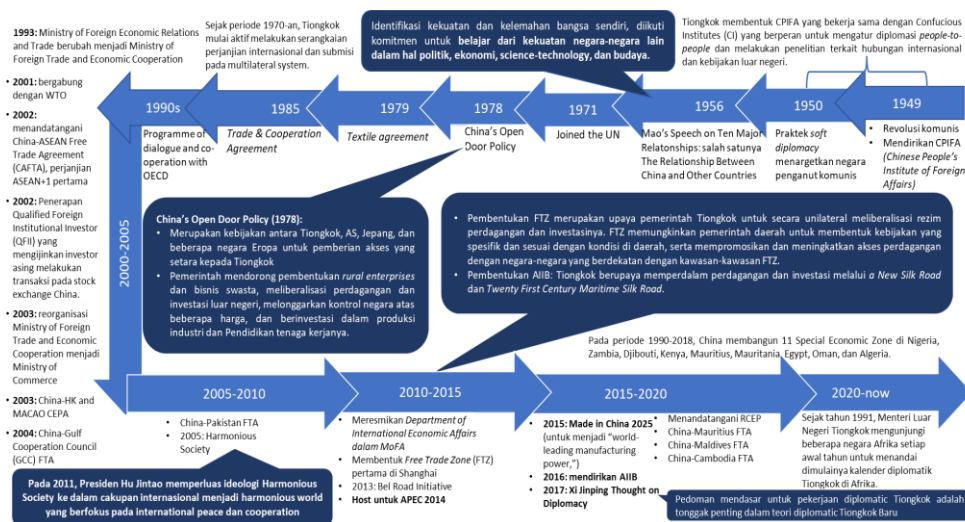
4.4. Koordinasi Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi berdasarkan Penerjemahan Visi Pemimpin Negara

Pada praktik keempat, di mana pelaksanaan dari diplomasi ekonomi dilakukan berdasarkan dari penerjemahan visi-visi yang disampaikan dalam speeches ataupun pemikiran-pemikiran dari Pemimpin negara ke dalam kebijakan-kebijakan diplomasi ekonomi, diplomasi ekonomi Tiongkok banyak di-*drive* oleh visi dari Pemimpin yang diterjemahkan dari *speech* maupun *thought* Pemimpin tersebut. Dimulai dari *Mao Zedong's Speech on Ten Major Relationships* (1956), dilanjutkan dengan konsep Presiden Hu Jintao terkait '*building a harmonious society*' yang

⁷ Okano-Heijmans, M. (2012). Japan's New Economic Diplomacy: Changing Tactics or Strategy? *Asia-Pacific Review*, 19(1), 62–87. <https://doi.org/10.1080/13439006.2012.678628>; Armstrong, S. (2021). Economic Diplomacy and Economic Security under Abe. *Asian Economic Policy Review*, 16(2), 283–299. <https://doi.org/10.1111/aep.12335>; Qin, Q. (2024). Ikibe, M., & Robert D. Eldridge, T. a. A. b. (2013). *The Diplomatic History of Postwar Japan*. Taylor and Francis. http://www.123library.org/book_details/?id=113571

berfokus pada international peace dan cooperation (2011); didukung oleh penjabaran Li Keqiang (Premier, jabatan pemimpin Pemerintahan Tiongkok) pada tahun 2015, terkait *'Made in China 2025'* yang bertujuan untuk mentransformasi Tiongkok menjadi pemimpin global dalam industri teknologi tinggi dan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing; hingga terkini, *'Xi Jinping Thought on Diplomacy'* yang menjadi pedoman mendasar untuk pekerjaan diplomatik Tiongkok dan merupakan tonggak penting dalam teori diplomatik 'Tiongkok Baru'. Visi-visi diatas merubah *mindset* diplomasi ekonomi Tiongkok yang diterjemahkan ke kebijakan diplomasi ekonomi Tiongkok yang lebih terbuka pasca periode 1960 an.

Merunut pada sejarah diplomasi ekonomi Tiongkok, Chinese People's Institute of Foreign Affairs didirikan pada 1949 untuk mengatur diplomasi *people-to-people* dan melakukan penelitian terkait hubungan internasional dan kebijakan luar negeri. Diplomasi *people-to-people* menargetkan sesama negara penganut paham komunis, atas dasar tenggang rasa (pada tahun 1952, Ministry of Trade berubah menjadi Ministry of Foreign Trade). Namun demikian, visi tersebut berkembang melalui *Mao Zedong's Speech on Ten Major Relationships* (1956) yang salah satunya adalah *The Relationship Between China and Other Countries*. Hal tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk aksi dengan bergabungnya Tiongkok ke United Nations (UN) pada 1971, kemudian diikuti dengan *China's Open Door Policy* (1978) yang merupakan kebijakan antara Tiongkok, AS, Jepang, dan beberapa negara Eropa untuk pemberian akses pasar yang setara kepada Tiongkok.



Gambar 5. Diplomasi Ekonomi Amerika Serikat, 1900–2024

Sumber: Penulis (diolah dari berbagai sumber)⁸

Sejak itu, Tiongkok mulai aktif melakukan serangkaian perjanjian internasional dan submisi pada *multilateral system*. Pada 1979, Tiongkok menandatangani kesepakatan dengan AS yang mengatur kuota ekspor produk tekstil Tiongkok ke AS. Sementara pada tahun 1985, disepakati *Agreement on Trade and Economic Cooperation between the European Economic*

⁸ Okano-Heijmans, M. (2012). Japan's New Economic Diplomacy: Changing Tactics or Strategy? *Asia-Pacific Review*, 19(1), 62–87. <https://doi.org/10.1080/13439006.2012.678628>; Armstrong, S. (2021). Economic Diplomacy and Economic Security under Abe. *Asian Economic Policy Review*, 16(2), 283–299. <https://doi.org/10.1111/aep.12335>; Qin, Q. (2024). Iokibe, M., & Robert D. Eldridge, T. a. A. b. (2013). *The Diplomatic History of Postwar Japan*. Taylor and Francis. http://www.123library.org/book_details/?id=113571

Community and the People's Republic of China untuk meningkatkan pasar ekspor Tiongkok di Eropa. Meningkatnya pengaruh Tiongkok dalam perdagangan global berkontribusi terhadap status Tiongkok sebagai 'key partner' OECD dengan disepakatinya *China Programme of dialogue and co-operation with OECD* pada tahun 1995. China bergabung ke *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2001 dan menandatangani China-ASEAN FTA (yang merupakan perjanjian ASEAN +1 pertama) pada tahun 2002. Secara umum dapat dirangkum bahwa visi-visi pada konsep yang disampaikan oleh para Pemimpin mengarahkan apa yang akan dituju oleh Tiongkok untuk periode waktu tertentu. Sementara itu, strategi kebijakan diplomasi ekonomi yang dilakukan adalah menyesuaikan terhadap kondisi apa yang akan dihadapi Tiongkok dalam merealisasikan visi-visi dimaksud pada periode terkait.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Secara umum, diplomasi ekonomi Indonesia masih dilaksanakan dalam lingkup yang sempit dan berfokus pada sektor komersial, yang tercermin dalam upaya promosi ekspor, pariwisata, dan investasi di tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Diplomasi ekonomi Indonesia telah melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, masing-masing bertanggung jawab atas aspek tertentu dalam Kepentingan Nasional Indonesia. Kementerian Luar Negeri berperan dalam mengelola hubungan luar negeri Indonesia, sementara Kementerian/Lembaga lainnya menangani sektor-sektor terkait pada Kepentingan Nasional Indonesia. Namun demikian pada pelaksanaannya, koordinasi dan interaksi antar pihak masih bersifat *ad hoc*, tanpa pemetaan dan pembagian tugas yang jelas. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan antar sektor, di mana masing-masing institusi mengedepankan kepentingan nasional dari perspektif sektoralnya sendiri.

Pengenalan istilah diplomasi ekonomi masih merupakan hal yang baru bagi Indonesia (secara relatif terhadap Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok). Oleh karena itu, dapat diterima jika ketiadaan koordinator atau orkestrator yang ditunjuk secara resmi menjadi hambatan dalam membangun arah strategis yang terintegrasi, mengakibatkan berbagai inisiatif dalam diplomasi ekonomi berjalan secara terfragmentasi dan kurang bersinergi secara optimal. Hal tersebut tidak hanya terkait penugasan, namun juga berdasarkan bahwa masih belum terdapat Kementerian/Lembaga yang *capable and suitable* (secara tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan) untuk dapat berperan sebagai koordinator maupun orkestrator. Namun demikian, trend global yang ada mengharuskan Indonesia -sebagai negara yang besar- untuk lebih memanfaatkan diplomasi ekonominya dalam perpolitikan global.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, strategi koordinasi pelaksanaan diplomasi ekonomi dapat berbeda-beda (mencakup struktur kelembagaan diplomasi ekonomi yang diadopsi, bentuk diplomasi ekonomi yang dilakukan, serta visi-visi diplomasi ekonomi yang diterapkan), namun perlu menyesuaikan terhadap kondisi Indonesia saat ini dan visi yang akan dicapai pada masa depan. Seiring dengan komitmen Indonesia untuk meningkatkan partisipasinya dalam berbagai inisiatif kerja sama dan forum serta diskusi pada level bilateral, regional, dan multilateral, penerapan strategi diplomasi ekonomi yang sesuai, mutlak diperlukan. Selanjutnya, tulisan ini mengusulkan kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk dapat diterapkan oleh Indonesia, dalam rangka meningkatkan peran diplomasi ekonomi dalam memperkuat pengaruh Indonesia di tengah era globalisasi.

Menggunakan *Bardach's Eightfold Path to More Effective Problem Solving* (Bardach, 2012), keempat alternatif pilihan kebijakan dinilai berdasarkan *administrative, economic,*

political, dan *legal viability*. *Administrative viability* berarti kebijakan harus mampu bertahan dalam kondisi implementasi di dunia nyata. Struktur birokrasi yang besar dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, sehingga kebijakan perlu dirancang untuk mengatasi tantangan seperti keterlambatan, resistensi birokrasi, dan ketidakefisienan. *Economic viability* menekankan efisiensi dan efektivitas biaya dalam evaluasi kebijakan. Kebijakan harus berkelanjutan secara finansial dengan menyeimbangkan biaya dan manfaat yang diharapkan. *Political viability* berarti Kebijakan harus dapat diterima secara politik, tidak menghadapi penolakan besar atau kekurangan dukungan. Jika sulit diterapkan, perencanaan strategis dan pembentukan koalisi mungkin diperlukan untuk meningkatkan penerimaannya. *Legal viability* berarti kebijakan harus sesuai dengan aturan hukum dan batasan institusi yang ada. Jika ada ketidakjelasan hukum, pembuat kebijakan dapat mengambil risiko terukur jika yakin tantangan hukum dapat diatasi secara strategis.

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian terhadap alternatif kebijakan koordinasi pelaksanaan diplomasi ekonomi (lihat Tabel 5 pada halaman berikut), koordinasi pelaksanaan diplomasi ekonomi pada satu lembaga menawarkan efisiensi secara administratif dan ekonomi, walau secara dasar hukum, perlu dilakukan perubahan pada UU pada Kementerian/Lembaga untuk penggabungan atau pelepasan struktur. Tantangan terbesar akan datang dari kerawanan secara politik, di mana Kementerian/Lembaga yang menjadi ujung tombak diplomasi cenderung akan memiliki *power* lebih yang akan menjadi ‘ancaman’ baik bagi Pemerintah maupun oposisi. Sebaliknya, pelaksanaan diplomasi ekonomi Lembaga terpisah menghindari konflik menawarkan situasi yang sangat *acceptable* dari kaca mata politik, di mana banyak Kementerian/Lembaga memiliki suara terkait diplomasi ekonomi. Secara dasar hukum, tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga tidak perlu berubah, namun demikian akan terdapat inefisiensi secara administrasi dan biaya (ekonomi) di mana masing-masing Kementerian/Lembaga terkait akan tumpang tindih mengurus diplomasi ekonomi.

Tabel 5. Evaluasi Terhadap Alternatif Kebijakan Koordinasi Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi

Alternatif Kebijakan	<i>Viability</i>			
	<i>Administrative (Operational)</i>	<i>Economic</i>	<i>Political</i>	<i>Legal (Institutional)</i>
Koordinasi Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi pada Satu Lembaga (studi kasus Amerika Serikat)	<i>High</i>	<i>High</i>	<i>Low</i>	<i>Medium</i>
Koordinasi Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi pada Lembaga Terpisah (studi kasus Jepang)	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>High</i>	<i>High</i>
Koordinasi Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi berdasarkan Undang-Undang terkait Diplomasi (studi kasus Korea Selatan)	<i>Medium</i>	<i>High</i>	<i>Medium</i>	<i>Low</i>
Koordinasi Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi berdasarkan Penerjemahan Visi Pemimpin Negara (studi kasus Tiongkok)	<i>High</i>	<i>Medium</i>	<i>Medium</i>	<i>Low</i>

Sumber: Hasil evaluasi berdasarkan *Bardach's Eightfold Path to More Effective Problem Solving* (Bardach, 2012)

Selanjutnya, koordinasi pelaksanaan diplomasi ekonomi berdasarkan undang-undang terkait diplomasi memiliki keuntungan dari segi ekonomi di mana penyusunannya tidak akan memakan banyak biaya. Implementasinya sendiri akan memakan waktu dan proses yang lumayan banyak secara administrasi. Secara politik, opsi ini tidak menguntungkan tapi juga tidak merugikan. Tantangan baru akan hadir dalam bentuk benturan tugas pokok dan fungsi antar Kementerian/Lembaga (yang tercantum pada Undang-Undang terkait) terhadap *grand design* atau *master plan* yang disusun. Terakhir, koordinasi pelaksanaan diplomasi ekonomi berdasarkan penerjemahan visi Pemimpin Negara menawarkan sinkronisasi lintas Kementerian/Lembaga yang lebih kuat (bersifat *top-down*). Secara biaya, tidak banyak perubahan yang perlu dilakukan. Dari kaca mata politik, akan cukup berimbang (menguntungkan pihak yang berkuasa dan tidak terlalu merugikan pihak oposisi). Namun demikian, terdapat potensi untuk kebijakan yang diambil oleh Pimpinan, akan bersifat tidak *feasible* secara legal, terhadap peraturan hukum domestik maupun internasional.

5.2. Rekomendasi

Acemoglu dan Robinson (2013) menjelaskan peran penting institusi yang bersifat inklusif dalam perkembangan suatu bangsa. Dalam penelitian mereka, institusi politik membentuk institusi ekonomi, dengan terdapat dua jenis institusi: institusi inklusif dan institusi ekstraktif. Karakteristik institusi inklusif mencakup partisipasi luas, pluralisme, serta adanya batasan dan pengawasan terhadap politisi. Di sisi lain, karakteristik institusi ekstraktif adalah absolutisme, kekuasaan yang terpusat, serta tidak adanya batasan atau mekanisme *check and balance*. Edward Luttwak adalah pemikir yang pertama kali menelurkan istilah geoekonomi pada tahun 1990⁹. Luttwak berargumen bahwa strategi geoekonomi yang sukses bergantung pada kolaborasi pemerintah yang mencakup tiga hal utama yaitu koordinasi antar lembaga pemerintah, kemitraan strategis antara sektor publik dan swasta, serta pemanfaatan *economic tools* untuk meningkatkan pengaruh geopolitik. Singkatnya, strategi geoekonomi yang berhasil memerlukan upaya yang terpusat dan terkoordinasi dengan baik antara lembaga pemerintah, dunia usaha, dan institusi non Pemerintah lainnya.

Berdasarkan hal di atas, serta hasil evaluasi terhadap analisis terhadap alternatif kebijakan koordinasi pelaksanaan diplomasi ekonomi pada bagian sebelumnya, maka tulisan ini merekomendasikan untuk melakukan beberapa kebijakan yang dapat diterapkan Indonesia untuk memperkuat fungsi dan peranan Kementerian Luar Negeri selaku koordinator dan orkestrator diplomasi ekonomi Indonesia untuk meningkatkan peranan diplomasi ekonomi dalam meningkatkan pengaruh Indonesia secara global. Amerika Serikat dan Jepang menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri harus mampu untuk menangani isu diplomasi ekonomi yang kompleks. Tiongkok melakukan perubahan struktur kelembagaan diplomasi ekonomi pada Pemerintahan yang menyesuaikan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negaranya. Untuk itu, Indonesia juga perlu untuk melakukan perubahan struktur kelembagaan Pemerintah dalam rangka mencapai visi-visi yang dicita-citakan. Kementerian Luar Negeri harus memiliki kewenangan yang cukup terkait perundingan perdagangan internasional serta kerja sama ekonomi dan pembangunan internasional. Peningkatan kewenangan salah satunya dapat dilakukan dengan melebur fungsi-fungsi terkait diplomasi ekonomi dari Kementerian lain ke dalam struktur Kementerian Luar Negeri.

Lebih lanjut, revisi terhadap UU Hubungan Luar Negeri saat ini tengah dalam tahap pembahasan dengan DPR, di mana pada rancangannya, juga akan mencakup definisi diplomasi

⁹ Luttwak, E. (1990). *From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce*. **The National Interest**, 24, 17–23.

ekonomi yang luas dan kompleks, yang akan banyak melibatkan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Oleh karena itu, perlu penguatan fungsi dan peranan Kementerian Luar Negeri tersebut juga perlu didukung oleh pembagian kewenangan yang jelas bagi Kementerian/Lembaga lainnya dalam mendukung diplomasi ekonomi. Institusi politik membentuk institusi ekonomi, di atas itu, institusi yang inklusif membangun kekokohan sebuah negara, salah satunya, melalui penciptaan dukungan yang solid terhadap proses diplomasi ekonomi. Proses negosiasi dan promosi dari diplomasi ekonomi adalah satu hal, namun hal utamanya adalah proses implementasi dari diplomasi ekonomi itu sendiri. Sebagai contoh, dalam rangka menciptakan sektor ekonomi yang terstruktur dan terkoordinasi secara baik dari hulu ke hilir, Jepang menggabungkan *Ministry of Economy, Trade, and Investment* sementara Korea Selatan memiliki *Ministry of Trade, Industry, and Energy*. Untuk itu, Indonesia dapat mempertimbangkan adanya perubahan struktur kelembagaan pada Kementerian/Lembaga terkait, dalam rangka memberikan dukungan yang solid bagi Kementerian/Lembaga yang menjadi koordinator diplomasi ekonomi Indonesia.

Sebagai suplemen dari kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan di atas, keterlibatan *non-state actors* dalam memfasilitasi proses diplomasi ekonomi juga perlu ditingkatkan. Selain dari strategi yang terpusat dan terkoordinasi, kolaborasi antara pemerintah dengan pihak non-pemerintah dan swasta juga penting, terutama dalam rangka pemanfaatan *tools* untuk meningkatkan pengaruh diplomasi ekonomi. Indonesia telah memiliki Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional/LDKPI (setara JICA dan KOICA), *Indonesia Trade Promotion Centre/ITPC* dan *Indonesia Investment Promotion Centre/IIPC* (setara JETRO), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (setara JBIC) dalam sebagai perangkat pendukung diplomasi ekonominya. Namun demikian, guna meningkatkan partisipasi sektor swasta, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk pembentukan lembaga seperti *the Overseas Koreans Foundation* (OKF) di Korea Selatan, untuk mendukung dan memanfaatkan diaspora Indonesia di luar negeri dalam mempromosikan identitas Indonesia (dalam hal budaya, kuliner, *fashion*, dan lainnya), sebagai salah satu upaya mendukung diplomasi ekonomi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty* (Paperback edition). Crown Business.
- Baldwin, D. A., & Kapstein, E. B. (2020). *Economic statecraft* (New edition). Princeton University Press.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2024). *A practical guide for policy analysis : the eightfold path to more effective problem solving* (Seventh edition). Sage ; CQ Press.
- Berridge, G., & Lloyd, L. (2012). *The Palgrave Macmillan dictionary of diplomacy* (3rd ed). Palgrave Macmillan.
- Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Definisi dan Pemetaan Diplomasi Ekonomi Indonesia*. Jakarta
- Creswell J.W. and Creswell J.D. (2018) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Dahl R.A. (1957) *The Concept of Power*. New York: Bobbs-Merrill.
- Hirschman A.O. (1945) *National Power and the Structure of Foreign Trade*. Berkeley: University of California Press.

- Kementerian Luar Negeri. (2015). *Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi atas Perjanjian Perdagangan dan Investasi*. Jakarta
- Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 28/B/RO/XI/2020/01 Tahun 2020. Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024
- Keohane, R.O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (REV-Revised). Princeton University Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctt7sq9s>
- Keohane R.O. and Nye J.S. (1973) Power and interdependence. *Survival* 15(4): 158–165. DOI: 10.1080/00396337308441409
- Keohane R.O. and Nye J.S. (1998) Power and interdependence in the information age. *Foreign Affairs* 77(5): 81. DOI: 10.2307/20049052.
- Keohane R.O. and Nye JS (2012) *Power and Interdependence*. Boston, MA : Longman.
- Killian, P. M. E. (2021). Economic Diplomacy as A Subject and Research Agenda: Practical, Conceptual and Methodological Issue. *Global Strategies*, 15(1), 51–78.
<https://doi.org/10.20473/jgs.15.1.2021.51-78>
- List, Friedrich. (1909) *The National System of Political Economy* by Friedrich List, trans. Sampson S. Lloyd, with an Introduction by J. Shield Nicholson (London: Longmans, Green and Co., 1909).
- Luttwak E.N. (1990) From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce. *The National Interest* 20: 17–23.
- Martauli, Sofia. (2018). Peran diplomasi sebagai cara meningkatkan Pengakuan internasional terhadap posisi suatu Negara dalam mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri (Studi kasus di Indonesia). *Jurnal Good Governance*. 13. 10.32834/gg.v13i1.30.
- Mearsheimer J.J. (2001) *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: Norton.
- Morgenthau H.J. and Thompson K.W. (1993) *Politics among Nations : The Struggle for Power and Peace*. New York: McGraw-Hill.
- Nabbs-Keller, Greta. (2013). Reforming Indonesia's Foreign Ministry: Ideas, Organization and Leadership. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*. 35. 56-82. 10.1355/cs35-1c.
- Okano-Heijmans, M. (2011). "Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies". *The Hague Journal of Diplomacy*, 6(1):7–36.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020. Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional, sebagai bagian dari diplomasi ekonomi.
- Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022. Perlindungan, Fasilitasi, dan Pencatatan Penanaman Modal Indonesia di Luar Negeri yang mencakup definisi terkait Diplomasi Ekonomi.
- Presisi Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Penyusunan Rancangan Strategi Perkuatan Diplomasi Ekonomi Indonesia*. Jakarta

- Priamarizki A. (2024). Understanding the Domestic Determinants of Indonesia's Hedging Policy towards the United States and China. *Contemporary Southeast Asia*, 46(1), 19–42. <https://www.jstor.org/stable/27301253>
- Rana, Kishan S. (2007). Article: 'Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries', Book: *The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiations in International Relations*, eds. Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, (Ashgate, London, 2nd Edition, 2007), pp. 201-20.
- Rosecrance R. and Stein A. (1973) Interdependence: Myth or Reality. *World Politics* 26(1): 1–27.
- Santoso, R. B., Dermawan, W., & Moenardy, D. F. (2024). Indonesia's rational choice in the nickel ore export ban policy. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2400222>
- Sending, O. J., Pouliot, V., & Neumann, I. B. (2011). The Future of Diplomacy: Changing Practices, Evolving Relationships. *International Journal*, 66(3), 527–542. <https://doi.org/10.1177/002070201106600301> (Original work published 2011)
- Singer J.D. (1963) Inter-Nation Influence: A Formal Model. *American Political Science Review* 57(2): 420–430. DOI: 10.2307/1952832.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999. Hubungan Luar Negeri. 14 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 12 Januari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 11 Maret 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4
- Waltz K.N. (1979) *Theory of International Politics*. Reading: Mass: Addison-Wesley Pub. Co.
- World Bank: World Development Indicators. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>. 22 Februari 2024 (13:45)